

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN

I. Risiko Hukum

42. Pengungkapan Kualitatif Umum

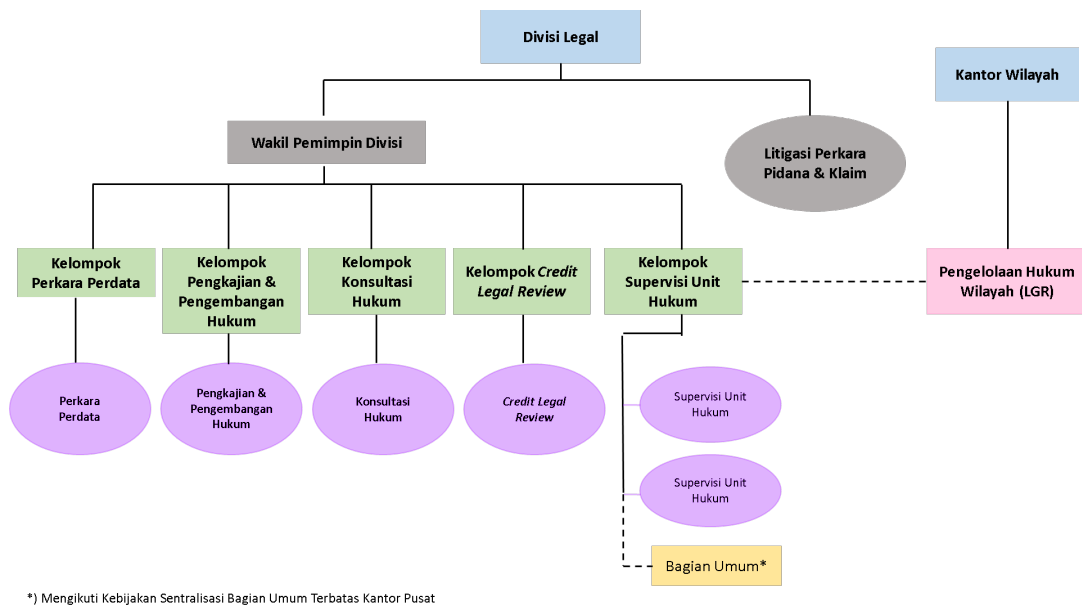
Merupakan risiko adanya tuntutan hukum dan/ atau kelemahan perikatan dan/ atau ketiadaan/ perubahan perundang-undangan.

Tata Kelola dan Organisasi

Manajemen Risiko Hukum pelaksanaannya dilakukan oleh Divisi Legal di bawah pengawasan aktif Direktur yang membawahi fungsi hukum yaitu Direktur *Human Capital & Compliance*. Dalam melakukan pengelolaan Risiko Hukum, Divisi Legal bekerja sama dengan Unit Pengelolaan Hukum atau staf yang menangani fungsi hukum yang terdapat pada Divisi/ Satuan/ Wilayah atau unit organisasi lainnya dimana Satuan Kerja Bidang Hukum dimaksud berfungsi sebagai *'legal watch'*, yang menyediakan kajian/ *advise* hukum kepada unit organisasi dan/atau pegawai pada setiap jenjang organisasi untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan perikatan, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi.

Dalam pengelolaan Risiko Hukum, Divisi Legal bekerja sama dengan Divisi Enterprise Risk Management dalam melakukan penilaian dan pemantauan implementasi Manajemen Risiko Hukum secara berkala.

Organisasi Manajemen Risiko Hukum



Kebijakan dan Prosedur

Implementasi Manajemen Risiko Hukum mengacu pada Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Hukum serta kebijakan lain yang berkaitan dengan pengelolaan Risiko Hukum.

Guna menghasilkan kebijakan Manajemen Risiko Hukum yang tepat, Divisi Legal dan Divisi Enterprise Risk Management melakukan evaluasi

dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Hukum secara berkala, sesuai dengan perkembangan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Proses

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Hukum, BNI menerapkan kebijakan Manajemen Risiko Hukum dalam sebuah alur proses yang terdiri dari:

1. Melakukan identifikasi Risiko Hukum secara berkala dan berkesinambungan. Proses identifikasi Risiko Hukum dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko Hukum yang sekurang-kurangnya dilakukan terhadap Risiko Hukum dari produk dan/ atau aktivitas usaha BNI serta Risiko Hukum dari produk dan/ atau aktivitas baru melalui proses pengendalian Manajemen Risiko Hukum yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan;
2. Melaksanakan pengukuran Risiko Hukum yang dilakukan dengan menggunakan parameter, indikator faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan dan faktor ketiadaan dan/ atau perubahan perundang-undangan dalam identifikasi Risiko Hukum. Hasil pengukuran Risiko Hukum tercermin dalam Profil Risiko Hukum;
3. Melakukan pemantauan Risiko Hukum dengan mengevaluasi eksposur Risiko Hukum yang melekat terutama yang bersifat material atau yang berdampak pada permodalan BNI. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur Risiko Hukum tersebut disusun dalam suatu Sistem Informasi Manajemen Risiko Hukum (SIM Risiko Hukum) yang menyediakan laporan eksposur Risiko Hukum secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan) termasuk tindak lanjut yang diperlukan;
4. Proses pengendalian Risiko Hukum digunakan terutama terhadap kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BNI. Proses pengendalian Risiko Hukum, dilakukan antara lain dengan:
 - a. Melakukan penilaian/ *assessment* berupa kajian yuridis dalam hal terdapat produk dan/ atau aktivitas baru atau terdapat penambahan/ perubahan fitur atas produk BNI;
 - b. Memberikan *advise* hukum dan/ atau pendampingan hukum dalam hal terdapat Risiko Hukum dalam aktivitas operasionalnya;
 - c. Melakukan *review* berkala terhadap format perjanjian standar, antara lain perjanjian kredit, guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku;
 - d. Melakukan *review* secara berkala terhadap kontrak atau perjanjian antara BNI dengan pihak lain, khususnya untuk perjanjian non-standar atau perjanjian yang belum dibakukan dalam Pedoman Perusahaan BNI;
 - e. Melakukan pemantauan secara intensif atas permasalahan hukum, khususnya gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum yang melibatkan BNI sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat.